

**PENGARUH KOLABORASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL
DAN MONETER TERHADAP PDRB RIIL PER KAPITA PADA
SEPULUH PROVINSI DI INDONESIA**



Tesis Oleh:

SYAHRIMI

01022682327005

ILMU EKONOMI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Magister Ilmu Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Proposal : Pengaruh Kolaborasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Moneter Terhadap PDRB riil per kapita Pada Sepuluh Provinsi di Indonesia
Nama Mahasiswa : Syahrini
NIM : 01022682327005
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Kekhususan : Ilmu Ekonomi

Menyetujui,

Pembimbing 1,



Dr. Anna Yulianita, S.E., M. Si

NIP. 197007162008012015

Pembimbing 2,



Dr. Ariodillah Hidayat, S.E., M. Si

NIP. 197609112014091003

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Ekonomi,



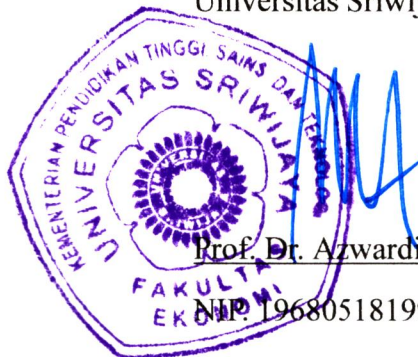
Dr. Anna Yulianita, S.E., M. Si

NIP. 197007162008012015

Dekan

Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Azwardi, S.E., M. Si

NIP. 196805181993031003

Tanggal Lulus: 19 Juni 2025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662

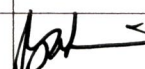
Tel: (0711) 580964, 580646 Fax:(0711) 580964

Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139

Laman: <http://fe.unsri.ac.id> – email : dekan@fe.unsri.ac.id

MATRIK PERBAIKAN TESIS

Nama : Syahrini
NIM : 01022682327005
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Kekhususan : Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah
Pembimbing : 1. Dr. Anna Yulianita, S.E., M. Si ()
2. Dr. Ariodillah Hidayat, S.E., M. Si ()

No	Dosen Penguji	Saran dan Masukan	Keterangan	Paraf
1	Prof. Dr. Didik Susetyo, S.E., M. Si	- Masih banyak typo sebaiknya diperbaiki - Masalah cukup satu saja - Coba jelaskan kata kolaborasi dalam judul - Alasan sample hanya 10 provinsi, jelaskan - Model terpilih <i>Fixed Effect</i> sebaiknya beri penjelasan dan uji tersebut - Pembahasan per provinsi berdasarkan angka intersep - Tambah referensi hasil pembahasan	Sudah diperbaiki	
2	Dr. Abdul Bashir, S.E., M. Si	- Konsisten dalam penulisan - Penulisan istilah harus konsisten - Pengujian hasil harus konsisten dengan metode - Kalimat terlalu boros dan bertele tele harus dibuat konsisten	Sudah diperbaiki	

Palembang, 14 Juli 2025

Koordinator Program Studi

Magister Ilmu Ekonomi,



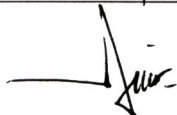
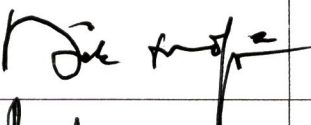
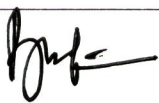
Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si

NIP. 197007162008012015



BUKTI TELAH MEMPERBAIKI TESIS
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Anna Yulianita, S.E., M. Si		07 Juli 2025
2	Dr. Ariodillah Hidayat, S.E., M. Si		11 Juli 2025
3	Prof. Dr. Didik Susetyo, S.E., M. Si		02 Juli 2025
4	Dr. Abdul Bashir, S.E., M. Si		02 Juli 2025

Menerangkan bahwa:

Nama : Syahrini
NIM : 01022682327005
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Bidang Kajian Utama : Ilmu Ekonomi
Judul Tesis : Pengaruh Kolaborasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Moneter Terhadap PDRB riil per kapita Pada Sepuluh Provinsi di Indonesia

Palembang, 14 Juli 2025

Koordinator Program Studi

Magister Ilmu Ekonomi,



Dr. Anna Yulianita, S.E., M. Si

NIP. 197007162008012015



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139

Telepon (0711) 350756 Faximile, (0711) 350756

Laman : www.mm.fe.unsri.ac.id Email : s2ilmuekonomi@fe.unsri.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Ketua	: Dr. Anna Yulianita., S.E., M. Si NIP. 19700716208012015	()
Sekretaris	: Dr. Ariodillah Hidayat., S.E., M. Si NIP. 197609112014091003	()
Anggota (1)	: Prof. Dr. Didik Susetyo, S.E., M. Si NIP. 196007101987031003	()
(2)	: Dr. Abdul Bashir., S.E., M. Si NIP. 198506122023211021	()

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Syahrini
NIM : 01022682327005
Jurusan : Magister Ilmu Ekonomi
Bidang Kajian : Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul:

Pengaruh Kolaborasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Moneter Terhadap PDRB riil per kapita Pada Sepuluh Provinsi di Indonesia

Pembimbing I : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
Pembimbing II : Dr. Ariodillah Hidayat, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 19 Juni 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam Tesis ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 02 Juli 2025
Pembuat Pernyataan,



Syahrini
NIM. 01022682327005

ABSTRACT

THE EFFECT OF COLLABORATION OF FISCAL AND MONETARY DECENTRALIZATION POLICIES ON REAL GRDP PER CAPITA IN TEN PROVINCES IN INDONESIA

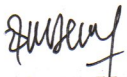
By:

Syahrini

The implementation of regional government by providing fiscal decentralization authority in regulating and managing regional original income provides an illustration that regional fiscal independence has answered doubts about achieving an increase in community welfare when the regional government structure was handed over. Using the Ordinary Least Square method, panel data for the period 2010 - 2024 provides an illustration that community welfare can be measured by the indicator of increasing real GRDP per capita which has a significant positive relationship with increasing local original income with a coefficient of 0.258, transfer funds to regions as well as village funds with a coefficient of 0.046, human development index with a coefficient of 0.070 and regional investment with a coefficient of 0.006. However, challenges to increasing real GRDP growth per capita come from variable interest rates which has a significant negative relationship of 0.202 and unequal income which has a significant negative relationship of 0.011 inequality in population distribution which have a negative impact on growth. The results of the intercept model, assuming constant independent variables without performance, show that the real GRDP per capita value is the largest in East Kalimantan Province amounting to 4.566 rupiahs and the lowest in West Java Province amounting to 2.985 rupiahs. It is important for regional governments to adopt policies regarding fiscal incentives that encourage regional income and investment growth, including investment to improve human resources. Regional governments also need to collaborate with central banking authorities by controlling interest rates from the monetary side to maintain balanced growth.

Keywords: Real GRDP per capita, Original Regional Income, Transfer Funds to Regions as well as Village Funds, Regional Investment, Interest Rates

Advisor I



Dr. Anna Yulianita, S.E., M. Si

NIP. 197007162008012015

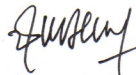
Advisor II



Dr. Ariodillah Hidayat, S.E., M. Si

NIP. 197609112014091003

Head of the Economics Study Program



Dr. Anna Yulianita, S.E., M. Si

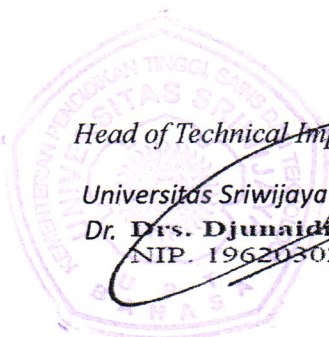
NIP. 197007162008012015

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, MSLs

NIP. 196203021988031004



ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan desentralisasi fiskal dalam mengatur dan mengelola pendapatan asli daerah memberikan gambaran bahwa kemandirian fiskal daerah telah menjawab keraguan terhadap tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat ketika dilakukan penyerahan struktur pemerintahan daerah. Dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* data panel periode 2010 – 2024 memberikan gambaran bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan indikator peningkatan PDRB riil per kapita mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan koefisien sebesar 0,258, dana transfer ke daerah serta dana desa dengan koefisien sebesar 0,046, indeks pembangunan manusia dengan koefisien sebesar 0,070 dan investasi daerah dengan koefisien sebesar 0,006. Namun, tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB riil per kapita berasal dari variabel suku bunga yang mempunyai hubungan negatif signifikan sebesar 0,202 dan ketimpangan pendapatan yang mempunyai hubungan negatif signifikan sebesar 0,011 yang tidak merata dalam distribusi penduduk yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Hasil intersep model, dengan asumsi variabel independent konstan menunjukkan nilai PDRB riil per kapita terbesar pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar 4,566 rupiah serta terendah pada Provinsi Jawa Barat sebesar 2,985 rupiah. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan mengenai insentif fiskal yang mendorong pertumbuhan pendapatan dan investasi daerah, termasuk investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pemerintah daerah juga perlu berkolaborasi dengan otoritas bank sentral melalui pengendalian suku bunga dari sisi moneter untuk tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan.

Kata Kunci: PDRB riil per kapita, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa, Investasi Daerah, Tingkat Suku Bunga

Pembimbing I



Dr. Anna Yulianita, S.E., M. Si
NIP. 197007162008012015

Pembimbing II



Dr. Ariodillah Hidayat, S.E., M. Si
NIP. 197609112014091003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,



Dr. Anna Yulianita, S.E., M. Si
NIP. 197007162008012015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Syahrimi
	NIM	:	01022682327005
	Tempat Tanggal Lahir	:	Palembang, 06 Juni 1980
	Alamat	:	Perumahan Kencana Damai Jalan Dahlia 3 Blok W No.4 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang
	Nomor Telepon	:	087795156008
Agama	:	Islam	
Jenis Kelamin	:	Laki	
Status	:	Menikah	
Kewarganegaraan	:	Indonesia	
Tinggi Badan	:	163 cm	
Berat Badan	:	85 kg	
Hobi	:	Travelling	
Email	:	alfi_syahri80@yahoo.co.id	
PENDIDIKAN FORMAL			
Sekolah Dasar	:	SD YKPP II Prabumulih	
SMP	:	SMP YKPP I Plaju	
SMU	:	SMU Negeri 8 Palembang	
Strata-1	:	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)-Bekasi	
Strata-2	:	Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan penduduk dapat dicapai melalui keseimbangan di pasar barang dan di pasar uang dengan sentuhan kebijakan pemerintah yang kolaborasi antara desentralisasi fiskal dengan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan secara bersama-sama menciptakan keseimbangan. Kolaborasi yang berarti mempunyai satu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pelayanan publik untuk kesejahteraan penduduk.

Tingkatan kesejahteraan setiap lapisan penduduk dapat diukur dengan menggunakan salah satu indikator makro ekonomi yaitu Produk Domestik Bruto riil per kapita atau Produk Domestik Regional Bruto riil per kapita di tingkat pemerintahan daerah. Perkembangan PDB riil per kapita Indonesia menurut harga berlaku berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (2024) mencatat sebesar IDR 78,6 juta atau setara dengan USD 4.960,3 terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar IDR 74,9 atau naik sebesar 4,88 persen, hal ini dapat mengindikasikan bahwa kesejahteraan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara pendapatan Gross National Income (GNI) per kapita merupakan variabel makroekonomi sebagai standar untuk menghitung tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan materi marginal di tingkat nasional, yang digunakan sebagai alternatif untuk mentransformasi PDB per kapita menjadi kesejahteraan materi (Saha, 2023).

Perkembangan perekonomian jika dilihat dari PDRB pada level daerah menunjukkan bahwa tingkat kekuatan daerah dalam mendorong nilai manfaat produk dalam periode waktu yang telah ditentukan. PDRB merupakan nilai tambah kotor barang serta jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik daerah yang timbul sebagai akibat adanya berbagai aktivitas perekonomian periode tertentu tanpa mempertimbangkan faktor dari hasil produksi dapat dipengaruhi oleh nilai residen atau non-residen (BPS Indonesia;2024). Dari sisi komponen penyediaan lapangan usaha, PDRB adalah akumulasi dari seluruh komponen pembentuk nilai manfaat total dari kemampuan yang dihasilkan oleh setiap komponen penyediaan lapangan usaha dari bermacam aktivitas hasil produksi. Studi ini memanfaatkan penggunaan data PDRB pada 10 provinsi di Indonesia dengan wilayah pada Gambar 1.1

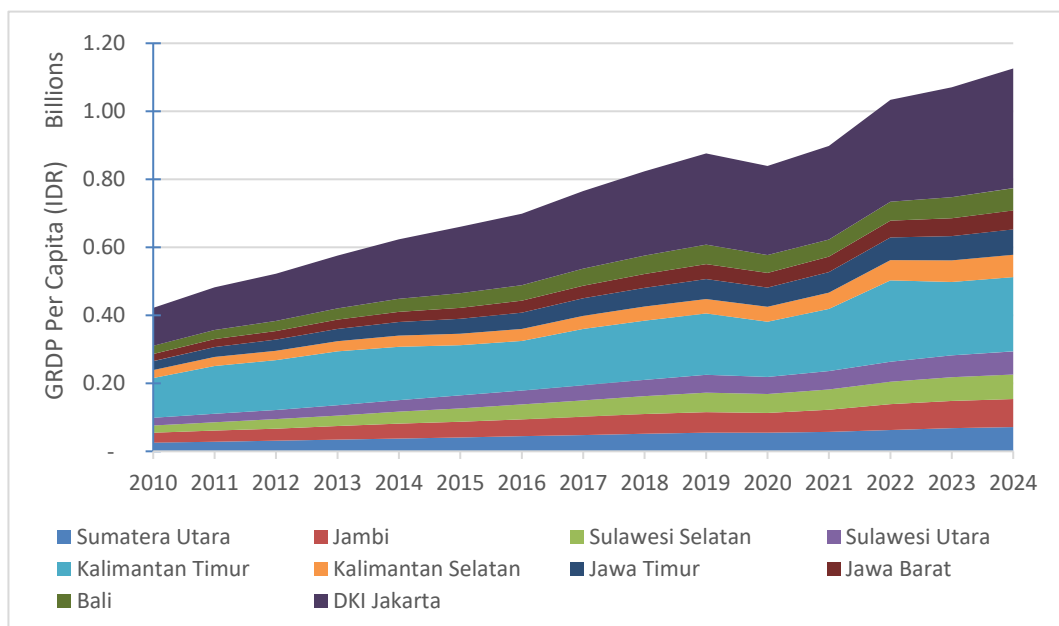


Gambar 1.1 Provinsi Yang Menjadi Objek Penelitian

Sumber: Peta Indonesia, proses data (2024)

Perkembangan PDB riil per kapita Indonesia tidak terlepas dari kondisi dan perkembangan PDRB riil per kapita pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini kita mengamati perbedaan tingkat perkembangan PDRB riil per kapita di

pemerintahan daerah dari sektor perikanan, kehutanan dan pertanian yang diwakili oleh Sumatera Utara sebesar 20,53% - 23,59%, Jambi 27,89% - 31,83%, Sulawesi Selatan 21,35% - 22,54% dan kemudian Sulawesi Utara 20,83% - 21,51%, dari sektor pertambangan dan penggalian yang diwakili oleh Kalimantan Timur 41,27% - 53,18% dan Kalimantan Selatan 19,06% - 32,05%, dari sektor industri pengolahan yang diwakili oleh Jawa Timur 30,32% - 30,71% dan Jawa Barat 41,12% - 42,24%, dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang diwakili oleh Bali sebesar 16,60% - 23,25%, dan dari sektor reparasi mobil dan sepeda motor serta grosir dan eceran. kontribusi perdagangan diwakili oleh DKI Jakarta sebesar 16,63% - 17,67%. Perkembangan PDRB riil per kapita menunjukkan *trend* peningkatan, namun secara rata-rata pertahun hanya dua provinsi dengan nilai PDRB riil per kapita diatas PDB riil per kapita nasional yaitu DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Perkembangan PDRB riil per kapita, 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, proses data, (2024)

Pemerintahan daerah telah memainkan peran dan tanggungjawab untuk upaya peningkatan pada PDRB riil per kapita dengan potensi dan karakteristik kewilayahan yang dimiliki. Tingkat pertumbuhan yang tidak stabil antara Amerika Serikat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Georgia memberikan gambaran korelasi negatif antara pengangguran skill terhadap kesenjangan PDB, sementara tingkat pengangguran skill dan kesenjangan PDB di Georgia berbanding terbalik dan berkorelasi (Giorkhelidze, 2024)

Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk memperkuat desentralisasi fiskal daerah dari sisi penerimaan pendapatan daerah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kualitas pemerintahan daerah dengan kondisi perekonomian kembali ke azas desentralisasi, yang berarti bahwa desentralisasi merupakan reformasi dari sisi kebijakan yang harus mempertimbangkan kualitas pemerintahan daerah menyerahkan wewenang (Muringani *et al.*, 2022.). Dengan pemberian pengaturan desentralisasi fiskal pendapatan daerah melahirkan berbagai strategi dan kebijakan pemerintahan daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah provinsi yang terstruktur pada Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan kebijakan regulasi peraturan yang ada, termasuk kedalam kelompok PAD yaitu penerimaan dari hasil pajak daerah provinsi, penerimaan dari hasil sektor retribusi daerah provinsi, penerimaan dari hasil pengelolaan harta kekayaan daerah provinsi yang dispisahkan serta lainnya pendapatan asli daerah provinsi yang sah. Selanjutnya, pemerintah hendaknya berupaya untuk

mengefektifkan sistem perpajakan agar perusahaan mudah memahaminya dan mematuhi aturan hukum yang berlaku (Javeed Iqbal *et al.*, 2024). Karakteristik dalam reformasi desentralisasi fiskal daerah serta transformasi struktural secara radikal dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin yang berdampak positif terhadap perekonomian kewilayahan (Korotun *et al.*, 2020).

Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan *local taxing power*, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, *performance* layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Perpajakan menghasilkan negara yang lebih representatif dan akuntabel, karena ekstraksi pendapatan menciptakan kontrak sosial fiskal antara negara dan warga negara, dimana pemerintah cenderung melakukan tawar-menawar dengan pembayar pajak, bertukar perwakilan dan layanan untuk meningkatkan perpajakan (Brautigam, 2008; Moore, 2008; Prichard, 2015).

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi rasio pajak daerah provinsi dengan total penerimaan yang sah dari perekonomian daerah provinsi, nilai rasio pajak daerah provinsi yang diukur dengan *local tax ratio* yaitu rasio antara realisasi penerimaan pajak daerah provinsi dengan total penerimaan yang sah dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah provinsi, nilai rasio penerimaan pajak daerah provinsi merupakan angka rasio antara pajak daerah provinsi yang diterima sesuai amanat kewenangan dengan

PDRB, angka rasio penerimaan pajak daerah provinsi dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga (Afubero & Emmanuel, 2014; Nwanakwere, 2019).

Walaupun otonomi dalam penggalan sumber-sumber yang menjadi potensi penerimaan PAD telah diberikan pada tingkatan pemerintahan daerah, pemerintah pusat juga mengatur dan memberikan mandatori alokasi nilai transfer dana ke daerah. Mandatori nilai transfer dana ke daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sehingga tercapai tujuan bernegara untuk mensejahterakan masyarakat dengan indikator PDRB riil per kapita juga meningkat. Bentuk dana transfer ke daerah antara lain dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana insentif fiskal daerah serta bagi hasil pajak. Transfer dana pemerintah dalam bentuk program tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan melakukan pemantauan yang tepat untuk menangkap permasalahan di daerah dengan target pemerintah untuk mengurangi ketimpangan secara maksimal (Dharmadasa, 2023).

Dengan kebutuhan pembiayaan dalam pembangunan yang terus meningkat untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB riil per kapita, pemerintahan daerah juga perlu mencari alternatif pendanaan lainnya selain dari dana transfer ke daerah. Untuk itu pemerintahan daerah dapat melakukan pola kemitraan dengan membuka peluang investasi daerah untuk tumbuh dan memberikan kontribusi pada peningkatan PDRB riil per kapita. Investasi daerah dapat memberikan keuntungan bagi pemerintahan daerah untuk mengatasi kesenjangan dan memberikan

percepatan pelayanan publik disaat kondisi PAD yang sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus menempuh kebijakan dan insentif baru untuk menarik investor atau jenis penanaman modal asing lainnya yang dapat menguntungkan serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif untuk mengentaskan kemiskinan (Keita & Yu, 2021).

Seiring dengan usaha konkret yang dikerjakan oleh pemerintahan daerah provinsi untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan PDRB riil per kapita yang berdampak pada kesejahteraan, faktor indeks pembangunan manusia perlu untuk ditingkatkan. Faktor latar belakang pendidikan dan *skill* manusia dalam pembangunan juga menentukan klasifikasi pendapatan di setiap faktor produksi. Pendidikan memang memberikan keuntungan yang tinggi bagi negara dengan berpendapatan rendah dan menengah untuk menuju ke negara berpendapatan tinggi untuk mencapai tingkat pertumbuhan tinggi (Bah, 2023). Pemerintahan daerah harus mencari strategi untuk meningkatkan investasi daerah di bidang pendidikan, karena kemampuan kompetensi yang tinggi menjadi daya saing dalam pembangunan manusia. Seperti kebijakan desentralisasi fiskal pada pendidikan prasekolah di Tiongkok untuk mengidentifikasi pertumbuhan PDB per kapita dalam jangka panjang (Tu *et al.*, 2018).

Pertumbuhan PDRB riil per kapita yang besar harus diikuti juga dengan pemerataan pendapatan dalam populasi wilayah pemerintahan daerah. Terkadang perkembangan perekonomian tinggi tidak dapat merespon untuk menjaga keseimbangan dalam pemerataan pendapatan. Dalam struktur lapisan sosial masyarakat, ketimpangan pendapatan masyarakat masih ada pada tingkatan

pemerintahan daerah. Pemerintahan dapat mengambil langkah strategi pertumbuhan yang didorong oleh pendapatan yang ditujukan untuk meningkatkan upah dan pendapatan rumah tangga untuk merangsang perekonomian pertumbuhan (Lee, 2024). Ketimpangan yang memberikan pengaruh antara hubungan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, ukuran yang dipergunakan untuk menghitung nilai ketimpangan pendapatan mempunyai nilai negatif serta dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara Uni Eropa (Saucedo-Acosta, 2024).

Peningkatan PDRB riil per kapita diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah yang di dukung oleh peningkatan PAD, peningkatan dana transfer ke daerah serta aktivitas investasi daerah akan meningkatkan permintaan akan nilai kebutuhan barang dan jasa. Peningkatan kebutuhan barang ini akan memicu tingkat inflasi daerah, untuk itu pemerintahan daerah perlu berkolaborasi dengan otoritas bank sentral dari sisi kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Salah satu kebijakan moneter yang diambil untuk mengendalikan tingkat suku bunga pinjaman bank. Reformasi dalam kebijakan moneter dan dinamika pasar uang untuk meningkatkan daya saing dan pengendalian suku bunga dan cabang bank komersial untuk tingkat pembentukan modal, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Bista & Basnet, 2022). Laju pertumbuhan PDB per kapita dipengaruhi signifikan oleh variabel antara lain: tingkat suku bunga dari sisi kebijakan moneter dan defisit atau surplus belanja pemerintah dari sisi bidang kebijakan fiskal (Stawska & Mischczyńska, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan pemerintahan daerah dalam melihat: Bagaimana pengaruh PAD, nilai dana transfer daerah dan dana desa, investasi daerah, indeks pembangunan manusia, tingkat suku bunga serta ketimpangan pendapatan terhadap perkembangan PDRB riil per kapita pada sepuluh wilayah provinsi di negara Indonesia? Secara khusus, penelitian ini memberikan hipotesis bahwa tingkat suku bunga dan ketimpangan pendapatan akan menurunkan PDRB riil per kapita pada sepuluh wilayah provinsi di negara Indonesia secara signifikan. Metodologi pendekatan dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* regresi panel data, fokus studi ini mengkaji dampak pengaruh seluruh variabel diatas terhadap PDRB riil per kapita.

Penelitian sejenis yang membahas variabel-variabel berpengaruh pada pertumbuhan PDRB riil per kapita suatu wilayah, namun dalam penelitian ini mempunyai keterbaruan dengan menggunakan analisis komparatif yang mendalam mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal daerah dari sisi pendapatan asli daerah provinsi untuk melihat kebijakan yang berbeda pada tingkatan pemerintahan daerah provinsi berdasarkan atas potensi, karakteristik serta permasalahan kewilayahan yang dimiliki.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam studi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh variabel PAD, nilai dana transfer ke daerah dan dana desa, investasi daerah, indeks pembangunan manusia, tingkat suku bunga serta ketimpangan pendapatan terhadap perkembangan PDRB riil

per kapita pada sepuluh wilayah provinsi di negara Indonesia secara parsial dan secara bersama-sama?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh hubungan variabel PAD, nilai dana transfer ke daerah dan dana desa, investasi daerah, indeks pembangunan manusia, tingkat suku bunga serta ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan PDRB riil per kapita pada sepuluh wilayah provinsi di negara Indonesia secara parsial dan secara bersama-sama.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari studi ini sebagai berikut:

1. Studi ini diharapkan mampu menyumbangkan pengetahuan yang lebih detail tentang pengaruh hubungan antara variabel PAD, nilai dana transfer ke daerah dan dana desa, investasi daerah, indeks pembangunan manusia, tingkat suku bunga serta ketimpangan pendapatan terhadap perkembangan PDRB riil per kapita pada sepuluh wilayah provinsi di negara Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya teori-teori ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Penelitian ini akan menyediakan landasan konseptual untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pembangunan daerah menuju ekonomi berkelanjutan di sepuluh daerah provinsi di Indonesia.

Temuan dari studi ini dapat memberikan panduan untuk para pembuat kebijakan di daerah untuk merumuskan arah dan strategi pembangunan perekonomian daerah secara berkesinambungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah daerah dan *stakeholder* di sepuluh daerah provinsi di Indonesia tentang pentingnya memperhatikan faktor yang menjadi pengaruh dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan program kegiatan sub kegiatan serta pendanaan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan nyata untuk pengembangan sektor-sektor pertumbuhan ekonomi berdasarkan variabel yang diteliti pada sepuluh daerah provinsi di Indonesia. Penelitian ini dapat membantu para pengusaha dan investor dalam mengidentifikasi peluang bisnis yang berkelanjutan dan berpotensi memberikan dampak positif bagi ekonomi berkelanjutan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kerja sama antardaerah di pada sepuluh daerah provinsi di Indonesia dalam upaya untuk mempromosikan sektor unggulan sebagai penopang ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kerja sama

antardaerah dalam mengatasi tantangan bersama terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti literasi teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, M. A., Muriithi, D. K., Mbaabu, O., Adan, M. A., Muriithi, D. K., & Mbaabu, O. (2023). Effect of Human Capital Investment on Income Inequality in Kenya. 288, 30. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.4.288>
- Afonso, A., & Blanco-Arana, M. C. (2024). Does Financial Inclusion Enhance Per Capita Income in The Least Developed Countries? *International Economics*, 177(December 2023). <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2024.100479>
- Ahmed, M. M. (2022). Government Effectiveness and Development: South Asian Perspective. *Asian Social Science*, 18(8), 35. <https://doi.org/10.5539/ass.v18n8p35>
- Asrari, M. Z., & Wau, T. (2023). Macroeconomics, Sharia, and Economic Inequality in The Organization of Islamic Cooperation (Oic): An Empirical Study Makroekonomi, Syariah, Dan Ketimpangan Ekonomi Di Organization of Islamic Cooperation (OIC): *Sebuah kajian empiris Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International License (CC-BY-NC-SA)*. 10(3), 203–219. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20233pp203-219>
- Ayala, L., Herrero, A., & Martinez-Vazquez, J. (2021). Welfare Benefits in Highly Decentralized Fiscal Systems: Evidence On Interregional Mimicking. *Papers in Regional Science*, 100(5), 1178–1208. <https://doi.org/10.1111/pirs.12605>
- Aye, G. C., & Odhiambo, N. M. (2022). Dynamic Effect of Fiscal Policy on Wealth Inequality: Evidence From Middle-Income Countries. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2119705>
- Aysan, A. F., Demirbas, D., Disli, M., & Parra, M. S. C. (2023). Resilience and Path Dependency: Income Distribution Effects of GDP in Colombia. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 12(1), 87–105. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2023-0005>
- Bah, I. A. (2023). The Relationship Between Education and Economic Growth: A

- Cross-Country Analysis. *Research, Society and Development*, 12(5), e19312540522. <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i5.40522>
- Basumatary, I. R., Das, M., Basumatary, S., & Basumatary, K. (2024). Macroeconomic Determinants of Income Inequality Among Different Income Group Countries: Evidence From Panel Data. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 111–125. <https://doi.org/10.18488/35.v11i1.3614>
- Bista, R. B., & Basnet, P. (2022). Measuring Determinants of Time Deposit in The Commercial Banks in Nepal. *Quantitative Economics and Management Studies*, 3(1), 21–33. <https://doi.org/10.35877/454ri.qems721>
- Chen, W. Y., & Hsu, L. Y. (2024). Is Income Catch-up Related to Happiness Catch-up? Evidence From Eight European Countries. *Heliyon*, 10(5), e26544. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26544>
- Cota, B., Erjavec, N., & Jakšić, S. (2023). Economic Complexity and Income Inequality in EU Countries. *Croatian Operational Research Review*, 14(1), 77–86. <https://doi.org/10.17535/crorr.2023.0007>
- De Wettinck, Q., & van Mourik, A. (2024). The Impact of Economic Integration on Income Inequality in the EU: A Panel Data Analysis of the EU Members from 2002-2020. *Journal of Economic Integration*, 39(1), 1–41. <https://doi.org/10.11130/jei.2024006>
- Dempere, J., Qamar, M., Allam, H., & Malik, S. (2023). The Impact of Innovation on Economic Growth, Foreign Direct Investment, and Self-Employment: A Global Perspective. *Economies*, 11(7), 1–22. <https://doi.org/10.3390/economies11070182>
- Dharmadasa, C. (2023). Macroeconomic Determinants of Income Inequality in Sri Lanka. *International Journal of Management Thinking*, 1(1), 51–71. <https://doi.org/10.56868/ijmt.v1i1.9>
- Djamal, D., Fairou, C., & Oulad Brahim, L. (2023). Effect of Human Capital on Economic Growth in South Africa: an ARDL Approach. *Financial Markets, Institutions and Risks*, 7(4), 1–13. [https://doi.org/10.61093/fmir.7\(4\).1-13.2023](https://doi.org/10.61093/fmir.7(4).1-13.2023)

- El Yamani, R. (2024). A Study on The Effectiveness of Financial Development on Economic Growth of Morocco. *Revistamultidisciplinar.Com*, 6(1), 39–58. <https://doi.org/10.23882/rmd.24201>
- Evemy, J., Berry, C., & Yates, E. (2024). Low Interest Rates, Low Productivity, Low Growth? A Multi-Sector Case Study of UK-Based Firms' Funding and Investment Strategies in The Context of Loose Monetary Policy. *New Political Economy*, 29(2), 240–259. <https://doi.org/10.1080/13563467.2023.2240237>
- Giorkhelidze, D. (2024). Modern Analyses of Macroeconomic Indices for Medium and Long Term Plans in Georgia. *European Scientific Journal, ESJ*, 20(37), 26. <https://doi.org/10.19044/esj.2024.v20n37p26>
- Gong, Q., Liu, C., & Wu, M. (2021). Does Administrative Decentralization Enhance Economic Growth? Evidence From a Quasi-Natural Experiment in China. *Economic Modelling*, 94, 945–952. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.035>
- Ibrahimov, Z., Hajiyeva, S., Seyfullayev, I., Mehdiyev, U., & Aliyeva, Z. (2023). The Impact of Infrastructure Investments on The Country's Economic Growth. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 415–425. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.39](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.39)
- Isibor, A., Omankhanlen, A., Ehikioya, B., Osuma, G., Oladipo, A., Bunmi-Alo, A., & Ajalaadebowale, K. (2023). Achieving Sustainable Economic Growth in Sub-Saharan African Countries Using the Tool of Monetary Policy Effectiveness. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 12(3), 111–132. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2023-0027>
- Javeed Iqbal, Shazia Khalid, & Muhammad Tariq. (2024). The Impact of Tax Collection and Domestic Entrepreneurial Business Ventures on Services Sector in Pakistan: An ARDL Bound Test Approach. *Journal of Entrepreneurship and Business Venturing*, 4(1). <https://doi.org/10.56536/jebv.v4i1.84>
- Kaneva, T., Karpenko, M., Nasibova, O., Tabenska, J., & Tomniuk, T. (2023). Fiscal Decentralization Influence on Public Services Efficiency and

- Economic Growth. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 5(52), 68–78. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.52.2023.4193>
- Karangwa, A., & Su, Z. (2023). Towards a Multidimensional Model for Evaluating the Sustainable Effect of FDI on the Development of Host Developing Countries: Evidence from Africa. *Sustainability (Switzerland)*, 15(5). <https://doi.org/10.3390/su15054662>
- Keita, O., & Yu, B. (2021). Impact of Foreign Direct Investment on Welfare in Africa: Empirical Evidence from Guinea. *Journal of Economic Science Research*, 4(3). <https://doi.org/10.30564/jesr.v4i3.3147>
- Khan, Z., & Khan, M. A. (2023). The Effect of Monetary Policy on Income Inequality: Empirical Evidence from Asian and African Developing Economies. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 12(3), 133–158. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2023-0028>
- Klutse, S. K. (2021). The problem of economic growth in Sub-Saharan Africa. 129–139. <https://doi.org/10.14232/casep21c.9>
- Korotun, V., Kaneva, T., Drepin, A., Levaieva, L., & Kucherenko, S. (2020). The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth in Central and Eastern Europe. *European Journal of Sustainable Development*, 9(3), 215–227. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p215>
- Kurteš, S., Amidžić, S., & Kurušić, D. (2022). Relationship Between Foreign Direct Investments, Openness and Economic Growth: Evidence From Developing Countries. *EMC Review - Časopis Za Ekonomiju - APEIRON*, 24(2). <https://doi.org/10.7251/emc2202434k>
- Kuznetsova, N., Tkachuk, V., Obikhod, S., Vlasenko, T., Samborska, O., & Chorna, L. (2023). Development and Preservation of Human Capital Under The Conditions of The Creative Economy. *Financial Engineering*, 1, 80–87. <https://doi.org/10.37394/232032.2023.1.7>
- Lakhan, A. B., Ali, M., & Talreja, K. (2023). An Analysis of Economic Development and Human Development Index as Economic and Social Behavior: A Case Study of Pakistan. *Research Journal for Societal Issues*, 5(2), 318–329. <https://doi.org/10.56976/rjsi.v5i2.117>

- Lawson, R., Miozzi, V., & Tuszynski, M. (2024). Economic Freedom and Growth, Income, Investment, and Inequality: A Quantitative Summary of the Literature. *Southern Economic Journal*, 90(4), 1099–1135. <https://doi.org/10.1002/soej.12680>
- Lee, K. K. (2024). Korea's Economic Growth and The Growth Model in The Changing Global Economy. *Japanese Political Economy*. <https://doi.org/10.1080/2329194X.2024.2325981>
- Lin, H., & Brueckner, M. (2024). Inequality and Growth in China. *Empirical Economics*, 66(2), 539–585. <https://doi.org/10.1007/s00181-023-02472-0>
- Liu, C., Tu, J., & He, Y. (2023). Measurement of China's Human Development Index and Analysis of Its Influencing Factors From the Perspective of New Development Concept. *Social Indicators Research*, 167(1–3), 213–268. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03105-w>
- Manasseh, C. O., Nwakoby, I. C., Okanya, O. C., Ifediora, C. U., & Nzidee, W. A. (2023). The Impact of Foreign Direct Investment and Oil Revenue on Economic Growth in Nigeria. *Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Economics Series*, 33(3), 61–85. <https://doi.org/10.2478/sues-2023-0014>
- Minhaj, N., & Ahmed, R. (2023). Impact of Human Capital Development and Economic Growth on Global Competitiveness. *Global Economics Science*, 1–18. <https://doi.org/10.37256/ges.5120241632>
- Muringani, J., Dahl Fitjar, R., & Rodríguez-Pose, A. (n.d.). *Decentralisation, Quality of Government and Economic Growth Descentralización, calidad de Gobierno y Crecimiento Económico*.
- Nizam, N. S. K., Safian, S. S., Jamaludin, S., & Osman, A. A. (2024). The Effect of Inflation and Interest Rate on Consumer Spending: Empirical Evidence from Malaysia. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 11(2.2), 1–26. <https://doi.org/10.14738/assrj.112.2.16399>
- Onofrei, M., Oprea, F., Iașu, C., Cojocariu, L., & Anton, S. G. (2022). Fiscal Decentralization, Good Governance and Regional Development—Empirical Evidence in the European Context. *Sustainability (Switzerland)*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/su14127093>

- Robert Montances, J. G., & Angelo Verano, A. (2023). *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies* Impact of Selected Macroeconomic Variables in Economic Growth: Empirical Study in the Philippines. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Saha, J. C. (2023). Increasing Returns to GNI per Capita and The Human Development Index (HDI). *Les Cahiers Du Cread*, 39(1), 87–121. <https://doi.org/10.4314/cread.v39i1.4>
- Sarwar, G., Khan, Z. U., Saeed, A., & Sarfraz, M. (2023). Fiscal Consolidation and Income Inequality Nexus: Evidence from Pakistan. *Journal of Economic Impact*, 5(3), 287–292. <https://doi.org/10.52223/econimpact.2023.5314>
- Saucedo-Acosta, E. J. (2024). Income Inequality and Economic Growth at The European Union. *DIEM Dubrovnik International Economic Meeting*, 9(1), 73–80. <https://doi.org/10.17818/DIEM/2024/1.5>
- Semmerling, A., Paczoski, A., & Cirella, G. T. (2022). Decentralization and Tax Independence in OECD Countries: GDP per Capita Analysis From 1995–2018. *Journal of Banking and Financial Economics*, 2022(1(17)), 42–59. <https://doi.org/10.7172/2353-6845.jbfe.2022.1.3>
- Shah, F. N., Awan, M. S., & Tasleem, R. H. (2023). New Evidence on the Effect of Human Capital on Economic Growth of Pakistan. *Journal of Education and Social Studies*, 4(1), 166–175. <https://doi.org/10.52223/jess.20234116>
- Sima, M., Liang, P., & Qingjie, Z. (2023a). The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth: A Comparative Analysis of Selected African and OECD Countries. *Heliyon*, 9(9), e19520. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19520>
- Sima, M., Liang, P., & Qingjie, Z. (2023b). The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth: A Comparative Analysis of Selected African and OECD Countries. *Heliyon*, 9(9), e19520. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19520>
- Stawska, J., & Miszczyńska, K. (2022). Entrepreneurship and Sustainability Issues the Impact of Monetary and Fiscal Policy Variables on the EU Economic Growth. Panel Data Analysis * *Entrepreneurship And*

- Sustainability Issues*. 9(4). [https://doi.org/10.9770/jesi.2022.9.4\(20\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2022.9.4(20))
- Štilić, A., Mastilo, A., Vuković, K., & Mastilo, D. (2023). Innovative Solutions for Economic Growth: Exploring the Impact of Economic Freedoms on Foreign Direct Investment Attraction. *ECONOMICS - Innovative and Economics Research Journal*, 11(1), 29–44. <https://doi.org/10.2478/eoik-2023-0013>
- Tekola Jemberu, E. (n.d.). Financial Development and Distribution of Income in Low Income and Lower-Middle-Income Countries.
- Tu, B., Lin, Y. X., & Zhang, Y. M. (2018). Efficiency Evaluation and Influencing Factors Analysis of Governmental Expenditure on Preschool Education. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(6), 2533–2543. <https://doi.org/10.29333/ejmste/89775>
- Tvaronaviciene, M., Simelyte, A., & Stirblyte, G. (2023). The Impact of Foreign Direct Investment from the Nordic Countries on the Structure of Lithuania's Economy. *Marketing and Management of Innovations*, 14(4), 112–127. <https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-08>
- Udumoh, E. F., Subeno, T., & William, U. I. (2023). Assessment of the Impact of Some Socio - Economic Variables on Worldwide Average Life Expectancy: A Logit Approach. *Asian Journal of Probability and Statistics*, 21(1), 29–36. <https://doi.org/10.9734/ajpas/2023/v21i1454>
- Volume, |, & Issue, X. (2023). Monetary Policy and People's Socio-Economic Welfare in Nigeria. <https://doi.org/10.51244/IJRSI>
- Wawrosz, P., & Traksel, S. (2023). Negative Interest Rates and Its Impact on GDP, FDI and Banks' Financial Performance: The Cases of Switzerland and Sweden. *International Journal of Financial Studies*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/ijfs11020069>
- Zhang, P. (2022). Happiness Inequality has a Kuznets-style Relation With Economic Growth in China. *Scientific Reports*, 12(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-19881-3>
- Zhou, G., & Liu, L. (2024). The Effect of Inequality of Opportunity on Entrepreneurship: Evidence from China. *World Economy*, 47(6), 2264–2286.

<https://doi.org/10.1111/twec.13543>